



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp>

PENERAPAN EKONOMI SIRKULAR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI SMK PUSAT KEUNGGULAN

Aan Rosydiana

STMIK LIKMI, Ir. H. Juanda No. 96 Bandung 40132, Jawa Barat – Indonesia

Email: aanrosydiana@gmail.com,

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to describe how the implementation of circular economy in the Regional Public Service Agency at SMK Negeri 2 Ciamis. Given the importance of implementing a circular economy in BLUDs to support government programs in accordance with the master plan for implementing a circular economy until 2025. This research is important because the existence of BLUDs is directed at developing industry-based learning. Therefore, the BLUD administration model should be recognized as a model for other institutions seeking to achieve this status. This research uses a qualitative approach because it is a case study. Collecting data through interviews, observation and documentation. This analysis uses the basic concepts of Miles and Huberman's analysis. The conclusion of this study: The implementation of circular economy in running BLUD provides clarity in planning and budgeting by schools so that they can maximize the income received in order to provide welfare for school residents by providing remuneration in the form of salary, honorarium, fixed allowances, incentives, bonuses for achievements severance pay, severance pay, and/or pensions oriented towards achieving work goals and performance according to the position they hold. Environmental and waste management in the school environment applies the principle of Reduce by reducing energy use, Reuse by sharing existing assets, Recycle by reusing existing materials, Recovery by re-manufacturing products or components and Repair by replacing plastic packaging with paper-based ones.

Keywords: Circular Economy, BLUD, SMK, Center of Excellence

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sirkular ekonomi pada Badan Layanan Umum Daerah di SMK Negeri 2 Ciamis. Mengingat pentingnya implementasi ekonomi sirkular pada BLUD untuk mendukung program pemerintah sesuai dengan master plan implementasi ekonomi sirkular hingga tahun 2025. Penelitian ini penting dilakukan karena keberadaan BLUD diarahkan pada pengembangan pembelajaran berbasis industri. Oleh karena itu, model administrasi BLUD harus dikenal sebagai model lembaga lain yang ingin mencapai status ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sifatnya yang studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis ini menggunakan konsep dasar analisis Miles dan Huberman. Kesimpulan dari penelitian ini : Implementasi sirkular ekonomi dalam menjalankan BLUD memberikan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran oleh sekolah sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang diterima agar bisa memberikan kesejahteraan terhadap warga sekolah dengan adanya pemberian remunerasi berupa pemberian gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun dengan berorientasi pencapaian sasaran kerja dan kinerja sesuai jabatan yang diembannya. Pengelolaan lingkungan dan limbah di Lingkungan Sekolah menerapkan prinsip Reduce dengan Mengurangi penggunaan energi, Reuse dengan menggunakan bersama-sama aset yang ada, Recycle dengan menggunakan kembali material yang ada, Recovery dengan memanufaktur ulang produk atau komponen serta Repair dengan mengganti kemasan plastik dengan yang berbasis kertas.

Kata Kunci: Ekonomi Sirkular, BLUD, SMK, Pusat Keunggulan.

Rosidyana, Aan. (2023). Penerapan Ekonomi Sirkular Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Pusat Keunggulan. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10 (1),

Sejarah Artikel:

Dikirim 24-08-2022, Direvisi 14-01-2023, Diterima 26-01-2023.

PENDAHULUAN

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) sekarang ini berupaya untuk memberikan dukungan berupa pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), program *teaching factory*, dan program penunjang lainnya yang menasar pada sekolah kejuruan negeri dan swasta agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas lulusannya (Ghufron et al., 2019). SMK sebagai lembaga pendidikan formal yang mempersiapkan lulusannya agar siap kerja, berwirausaha, dan meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Slamet PH, 2009). Hasil kajian yang telah dilakukan di sejumlah SMK negeri dan swasta menunjukkan bahwa keberadaan dana BOS, serta pemberian dukungan operasional lainnya, belum dioptimalkan secara signifikan. (Direktorat Pembinaan SMK, 2016; Asih, Yudana & Sunu, 2014).

Pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar melakukan peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kerjasama dan penyesuaian dengan IDUKA, serta menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat pengimbasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya merupakan penerapan dari program SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) yang diharapkan nantinya dapat menjadi Sekolah Penggerak untuk mempercepat peningkatan kapasitas serta kompetensi guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia, serta mewujudkan SMK yang terselenggara dengan pengelolaan berbasis kolaborasi nyata dengan mitra dunia usaha, dunia industry, dunia kerja secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan No. 165/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan secara umum bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Secara khusus, Program SMK Pusat Keunggulan bertujuan untuk : 1) memperkuat kemitraan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan; 2) memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK, antara lain kepala SMK, pengawas sekolah, guru, teknisi, dan tenaga administrasi untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja; 3) memperkuat kompetensi keterampilan nonteknis (*softskill*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; 4) mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah; 5) meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital; 6) peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar peserta didik yang berstandar dunia kerja; dan 7) memperkuat kemitraan dan kerja sama antara Kemendikbudristek dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan.

Untuk mendukung SMK menjadi mandiri, inovatif, kreatif, produktif dan berhasil guna perlu dorongan dari pemerintah melalui Program Revitalisasi SMK dan program pembelajaran berbasis industri diharapkan dapat menggeser model tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi Badan

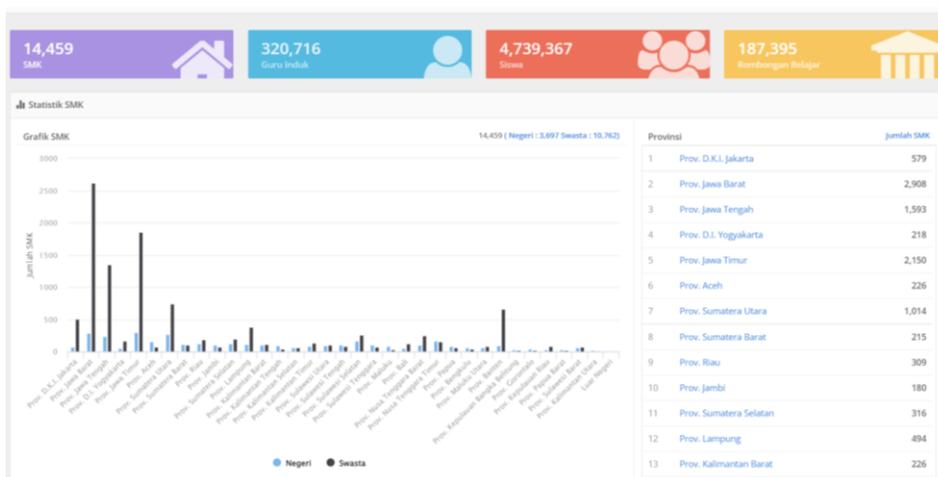
Layanan Umum Daerah (BLUD) (Apriliyadi, 2019). Dikeluarkannya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagai tidak lanjut dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Memberikan kesempatan menerapkan pengaturan aggaran berbasis kinerja pada pemeritahan mampu mendorong meningkatkan potensi yang dimiliki oleh organisasi publik agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan dalam mendapatkan penghasilan tambahan dalam rangka mensejahterakan rakyat (*Enterprising the Government*). Keberhasilan pelaksanaan BLUD memungkinkan SMK menjadi mandiri, mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi semua biaya karena dukungan rutin pemerintah seperti BOS mulai dikurangi, sehingga pengelolaan dana pendidikan untuk sekolah umum bisa dialihkan ke area strategis lainnya. Peningkatan mutu pendidikan dalam manajemen pendidikan adalah hal yang perlu dilakukan dan disempurnakan. Namun, perbaikan tidak hanya harus dilihat sebagai pengeluaran untuk peremajaan alat, tetapi juga harus dipahami sebagai model baru untuk membayangkan masa depan pendidikan. Model perbaikan pendidikan ke depan seharusnya tidak hanya diarahkan pada pencapaian sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga harus memaksimalkan kualitas sumber daya di sekolah dan harus didasarkan pada konsep keberlanjutan (*sustainability*). Keberlanjutan menjadi penting ketika berupaya untuk mengoptimalkan semua potensi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Memperhatikan penjelasan permasalahan sebelumnya, bahwa penerapan sirkular ekonomi pada BLUD di SMK Pusat Keunggulan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, pendayagunaan anggaran sehingga sekolah dapat menggali potensinya secara maksimal sesuai dengan program keahlian yang ada. Adanya keleluasaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, dapat mendorong peningkatan kualitas pembelajaran siswa untuk terus berkarya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan dari pendapatan yang diterima oleh sekolah serta peningkatan infrastruktur sekolah. Permasalahan dan potensi besar pengelolaan SMK Pusat Keunggulan untuk menjadi BLUD, perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam penerapan BLUD yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk membuat panduan bagi SMK yang dikelola pemerintah dalam mengaplikasikan ekonomi sirkular pada tata kelola BLUD sehingga akan berpengaruh pada hasil guna anggaran pembiayaan sekolah, peningkatan kemandirian, dan peningkatan kinerja sekolah.

METODE PENELITIAN

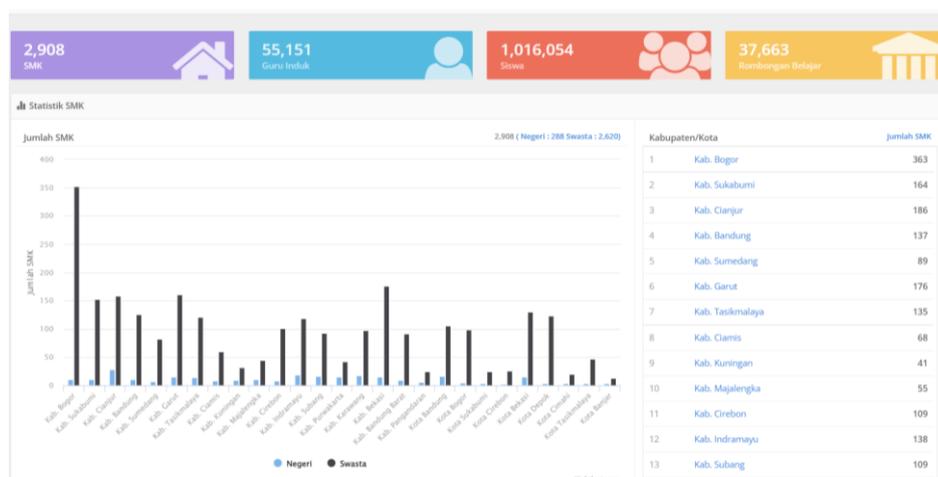
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan ilustrasi tentang perencanaan pengelolaan BLUD di SMK Negeri 2 Ciamis. Data disini berupa pernyataan dan catatan yang ditulis oleh tim perencana BLUD, oleh karena itu metode pengumpulan data menggunakan, wawancara, pemantauan di lapangan dan mempelajari dokumen yang telah disusun. Data yang diperoleh diolah menggunakan prosedur analisis triangulasi data, meliputi penyederhanaan data, pemaparan data, interpretasi dan pengambilan kesimpulan atau pemeriksaan ulang. Setelah proses pengorganisasian data menurut rumus dan domain dilakukan, data lapangan disajikan dan disandingkan dengan teori dalam bentuk paparan deskriptif untuk memudahkan pemahaman alur yang ada. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan persinggungan data lapangan dan teori yang digunakan. (Miles dan Huberman 1994:10-12).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program SMK Pusat Keunggulan diutamakan pada program keahlian yang mendukung sektor industri yang memiliki pertumbuhan positif sehingga berpotensi tinggi di masa depan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SMK pada tahun 2022 ini terdapat 14.459 SMK di seluruh Indonesia dan yang dikembangkan menjadi SMK Pusat Keunggulan berjumlah 641 SMK dari jumlah tersebut sebanyak 77 SMK berada di Provinsi Jawa Barat dari 2.908 SMK yang ada.



Gambar 1. Data Pokok SMK Se Indonesia



Gambar 2. Data Pokok SMK Se Provinsi Jawa Barat

SMK Negeri 2 Ciamis pada tahun pelajaran 2022/2023 ini membuka 6 program keahlian yakni, Teknik Konstruksi dan Perumahan, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Teknik Furnitur, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, dan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Rombongan belajar yang ada berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Data Poko Pendidikan SMK seluruhnya berjumlah 43 rombongan belajar, dengan jumlah siswa 1.526 orang.

Kompetensi Keahlian	Rombongan Belajar				Total
	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	
Seni Rupa - Desain Interior dan Teknik Furnitur	0	1	1	1	3
Teknik Komputer dan Informatika - Teknik Komputer dan Jaringan	0	2	2	0	4
Teknik Mesin - Teknik Pemesinan	0	4	4	0	8
Teknik Otomotif - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	0	4	4	0	8
Teknologi Informasi - Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	0	0	0	2
Teknologi Konstruksi dan Properti - Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	0	0	0	2
Teknologi Konstruksi dan Properti - Teknik Furnitur	1	0	0	0	1
Teknologi Konstruksi dan Properti - Bisnis Konstruksi dan Properti	0	1	1	0	2
Teknologi Konstruksi dan Properti - Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	0	0	0	1
Teknologi Konstruksi dan Properti - Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	0	2	2	0	4
Teknologi Manufaktur dan Rekayasa - Teknik Otomotif	4	0	0	0	4
Teknologi Manufaktur dan Rekayasa - Teknik Mesin	4	0	0	0	4
Total	14	14	14	1	43

Tabel 1. Data Jumlah Rombel Per Tingkat

Kompetensi Keahlian	Tingkat I		Tingkat II		Tingkat III		Tingkat IV		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Bisnis Konstruksi dan Properti	0	0	29	6	28	8	0	0	57	14	71
Desain Interior dan Teknik Furnitur	0	0	28	5	22	13	25	8	75	26	101
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	0	0	38	31	43	28	0	0	81	59	140
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	31	42	0	0	0	0	0	0	31	42	73
Teknik Furnitur	30	6	0	0	0	0	0	0	30	6	36
Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	40	32	0	0	0	0	0	0	40	32	72
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	0	0	138	1	134	9	0	0	272	10	282
Teknik Komputer dan Jaringan	0	0	40	31	45	26	0	0	85	57	142
Teknik Konstruksi dan Perumahan	27	9	0	0	0	0	0	0	27	9	36
Teknik Mesin	143	2	0	0	0	0	0	0	143	2	145
Teknik Otomotif	143	1	0	0	0	0	0	0	143	1	144
Teknik Pemesinan	0	0	137	3	141	3	0	0	278	6	284
Total	414	92	410	77	413	87	25	8	1,262	264	1,526

Tabel 2. Data Jumlah Siswa Per Tingkat

BLUD dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Fleksibilitas dalam hal ini berarti keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing (praktik bisnis yang sehat) untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah dan menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih berdayaguna, berhasilguna, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, dalam rangka membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang

pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Kepala daerah dalam hal ini bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, sedangkan pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Badan Layanan Umum Daerah yang akan dikembangkan di SMK Negeri 2 Ciamis diantaranya : Jasa Service Kedaraan Bermotor, Pencucian Kendaraan, Pembuatan Furnitur, Desain dan Konsultan Pembangunan, Mini Internet Service Provider, Jasa Pemasangan Jaringan Fiber Optic, Pemesinan CNC dan Fabrikasi Logam, serta Kantin Sekolah.

Penerapan tata kelola BLUD SMK dengan konsep ekonomi sirkular sangat cocok agar dapat membawa manfaat pada peningkatan kualitas layanan SMK kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh sekolah setelah menerapkan tata kelola BLUD antara lain sebagai berikut :



Gambar 4. Mind Map BLUD SMK dan Keunggulannya

Tingkat keberhasilan program BLUD ini dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh penyusunan rencana strategis yang di dalamnya harus memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, Rencana program dan kegiatan serta rencana keuangan, namun pada implementasinya ada beberapa tantangan dan kendala yang harus menjadi perhatian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan peneliti lain ditemukan adanya beberapa masalah umum dan tantangan terkait penerapan manajemen risiko di Organisasi Sektor Publik yaitu digitalisasi, pemerintahan, lingkungan, dan faktor manusia” (Alijoyo dan Fisabilillah 2021, 201).

Konsep ekonomi sirkular ini telah menarik perhatian organisasi dan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Istilah ekonomi sirkular pertama kali muncul dalam studi *Pearce dan Turner* (1990) yang mengacu pada hubungan timbal balik antara lingkungan dan aktivitas ekonomi. Para penulis mendefinisikan aliran material siklus tertutup, di mana sistem ekonomi beroperasi pada prinsip bahwa "segala sesuatu merupakan masukan untuk segala sesuatu yang lain". Namun, prinsip-prinsip ekonomi sirkular berasal dari karya *Boulding* (1966), yang memperkenalkan gagasan sistem tertutup untuk menetapkan karakteristik terbatas dari sumber daya yang tersedia untuk aktivitas manusia. Ekonomi sirkular dibentuk dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada degradasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sehingga mengurangi kemampuan biosfer untuk bereproduksi. Jadi, mulai dari asumsi ini, ekonomi sirkular menyoroti kebutuhan untuk meninjau kembali rantai produksi dan konsumsi tradisional, di

mana ekonomi sirkular didefinisikan sebagai “istilah umum untuk kegiatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang dalam produksi, sirkulasi, dan konsumsi” melalui nilai produk, bahan dan sumber daya disimpan dalam ekonomi selama mungkin, dan produksi limbah dapat diminimalkan.

Elemen utama yang ada pada ekonomi sirkular ialah 5R, yakni Reduce, Reuse, Recycle, Recovery serta Repair. 5 elemen tersebut bisa dicoba pada pengurangan penggunaan material mentah dari alam (*reduce*) lewat optimasi pemakaian material yang bisa digunakan kembali (*reuse*) serta pemanfaatan material hasil dari proses daur ulang (*recycle*) ataupun dari proses perolehan kembali (*recovery*) maupun dengan melaksanakan revisi (*repair*). SMKN 2 Ciamis melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah di Lingkungan Sekolah yang terdiri atas : 1) Kebijakan pengelolaan lingkungan meliputi pengaturan kebersihan, keamanan dan lainnya. Kebersihan lingkungan dan keamanan Sekolah menjadi tanggung jawab seluruh Lingkungan Sekolah dengan adanya penanggung jawab keamanan dan kebersihan lingkungan fisik.

Penanggung jawab kebersihan dan keamanan lingkungan fisik adalah Waka Sarana Prasarana, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh petugas khusus kebersihan dan Tim Adiwiyata yang diangkat oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Ciamis untuk melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Seluruh warga sekolah memiliki kewajiban bersama untuk menjaga keamanan di lingkungan Sekolah. Untuk keamanan lingkungan SMKN 2 Ciamis di waktu tertentu (malam hari) menugaskan penjaga malam. Dasar pelaksanaan tugas petugas kebersihan dan keamanan adalah surat tugas dari Kepala Sekolah. Penggajiannya dimasukkan dalam anggaran Belanja BLUD pada program administrasi kantor dengan kegiatan Jasa kebersihan.

Kebijakan pengelolaan limbah kimia berupa limbah cair dan padat yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia di bengkel, dan proses pembersihan peralatan. Pengelolaan limbah kimia cair dilakukan sendiri/dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Kebijakan pengelolaan limbah fisik berupa limbah padat berupa sampah organik dan non organik. Pengolahan limbah fisik dilakukan dengan metode pemilahan sampah mulai dari menyediakan tempat sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah dilanjutkan di Bank Sampah, sampah kering dimanfaatkan untuk dijadikan produk, atau langsung dijual (*Recycle*). Sedangkan sampah basah dimanfaatkan menjadi kompos dengan menggunakan proses komposter, yang setelah panen, kompos dapat dijual atau digunakan sendiri di lingkungan sekolah. Kebijakan pengelolaan limbah cair yang umumnya berasal dari kamar mandi, yang kemudian diolah menggunakan. Hasil olahan limbah cair menggunakan IPAL digunakan untuk menyiram tanaman, perawatan tanaman, untuk pembenihan, maupun digunakan untuk mengisi air di kolam ikan (*Reuse*).

Prinsip - prinsip yang dianut dalam konsep ekonomi sirkular adalah Efisiensi, kesehatan, lestari, keselamatan, kesejahteraan, dan inovasi. Efisiensi dalam bidang ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada upaya memaksimalkan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Sebuah sistem ekonomi yang efisien akan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat dengan seminimal mungkin menggunakan sumber daya atau *less-in more-out*. Prinsip tentang efisiensi ini terkandung dalam konsep rancangan *remanufaktur*, *refurbish*, dan daur ulang dengan cara mempertahankan komponen-komponen dan material-material teknis berputar di dalam serta memberi kontribusi bagi kesejahteraan.

KESIMPULAN

Implementasi sirkular ekonomi dalam menjalankan BLUD memberikan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran oleh sekolah sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang diterima agar bisa memberikan kesejahteraan terhadap warga sekolah dengan adanya pemberian remunerasi berupa pemberian gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun dengan berorientasi pencapaian sasaran kerja dan kinerja sesuai jabatan yang diembannya. Pengelolaan lingkungan dan limbah di Lingkungan Sekolah menerapkan prinsip *Reduce* dengan Mengurangi penggunaan energi, *Reuse* dengan menggunakan bersama-sama aset yang ada, *Recycle* dengan menggunakan kembali material yang ada, *Recovery* dengan memanufaktur ulang produk atau komponen serta *Repair* dengan mengganti kemasan plastik dengan yang berbasis kertas.

REKOMENDASI

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di sekolah yang lain dengan melaksanakan penelitian yang mendalam dengan sudut pandang yang berbeda tentang fleksibilitas pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada SMK Pusat Keunggulan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada STMIK LIKMI dan SMK Negeri 2 Ciamis serta semua pihak yang telah terlibat serta memberi kesempatan dan peluang untuk penelitian yang dilakukan dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alijoyo, F. Antonius, and Al Fattaah M. S. Fisabilillah. 2021. "Risk Management Implementation in Public Sector Organizations-Global Phenomena." *International Journal of Current Science Research and Review* 04 (03): 195–202. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V4-i3-07>.

Asih, N.W.P., Yudana, I.M. & Sunu, I.G.K.A. (2014). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Teknologi Nasional Denpasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 5(1).

Bakrun, M and Khurniawan, Arie Wibowo and Widjajanti, Chrismi. 2019. Panduan tata kelola BLUD SMK berbasis good school governance. Project Report. *Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta.

Direktorat Pembinaan SMK. (2016). *Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS SMK Dengan menggunakan teknik analytics Hierarchy Process (AHP)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Ghufron, A., Suwarna, Sudiyatno, Sunarto, S., Andayani, S., Setiadi, B. R., & Ismara, K. I. (2019). *Modernisasi Bengkel Laboratorium Kejuruan Abad 21*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Hazami, A. (2018). Mendikbud Dorong SMK Se-Indonesia Melek *Teaching Factory*. Diakses dari <https://news.detik.com/> pada tanggal 6 Mei 2019.

Indrayani, L. (2021). KONSEP CIRCULAR ECONOMY UNTUK MEWUJUDKAN INDUSTRI BATIK YANG BERKELANJUTAN. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, 3(1), E.03 1-8.

Retrieved from <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/140>.

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*, 2 ed. Sage Publications. London

R. Merli, M. Preziosi, and A. Acampora. 2018. 'How do scholars approach the circular economy? A systematic literature review'. *J. Clean. Prod.*, vol. 178, pp. 703–722. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.112.

Slamet PH. (2009). Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala Pendidikan* No. 2 (2011): Cakrawala Pendidikan Mei 2011 Edisi Khusus Dies Natalis, 189-203.

